



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

RENJA PERUBAHAN-PD

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

TAHUN 2022

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
Jl. Muso Bin Salim No.06, Tenggarong. 75512
e-mail : dinaspertaru@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja PD) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 merupakan salah satu bagian dari siklus perencanaan daerah yang memuat Perubahan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai Dokumen Perencanaan Tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara serta mengacu pada RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022.

Perubahan Renja ini sebagai bahan dalam memberikan arah pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022, agar pelaksanaan kegiatan dan anggaran diharapkan dapat mendorong tercapainya target kinerja dan target keluaran (output) sesuai dengan indikator dan tolak ukur kinerja kegiatan/sub kegiatan

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksud untuk masa mendatang.

Semoga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dapat bermanfaat dan memberikan acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta peningkatan pelayanan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 05 Agustus 2022

Kepala Dinas
Pertanahan dan Penataan Ruang



SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19671027 199403 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN LALU.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Urusan Pertanahan dan Penataan Ruang	5
2.2 Analisi Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.....	44
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD	45
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	88
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	72
BAB III RRENCANA KERJA DAN PENADANAAN PERANGKAT DAERAH	73
3.1 Program dan Kegiatan	73
BAB IV PENUTUP	108
LAMPIRAN TABEL	
Tabel 1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah 2022.....	7
Tabel 1.2 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan APBD Tahun 2022.....	24
Tabel C-31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022	50
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022	72
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju 2023.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana amanat dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian Dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah rentang Rencana pembangunan Jangka panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja pemerintah Daerah) pasal 343 ayat (1) bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang kabupaten Kutai kartanegara berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2022.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2022;
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut maka, RKPD dan RENJA-PD Kutai Kartanegara 2022, diperlukan perubahan dalam rangka mengakomodasi hasil pengendalian dan evaluasi serta hasil audit laporan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 oleh BPK.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah ;
- e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- l. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 21);
- m. Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja -PD) Tahun 2022 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Kerja (Renja - PD) Tahun 2022 adalah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2022, agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus dijalankan/direalisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara mengaju kepada Permendagri 86 Tahun 2017, dengan pokok bahasan Serta susunan garis besar penulisan renja ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang perubahan RENJA_pD, proses penyusunan perubahan RENJA_pD, keterkaitan antara RENJA-PD dengan dokumen RKpD, RENSTRA_PD, c,engan RENJA K/I dan RENJA provinsy'kabupaten/kota, serta tinctati tanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Organisasi perangkat Daerah, serta pedoman yang dijaclikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan RENJA-PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan perubahan RENJA_ PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) urusan Pertanahan dan urusan penataan ruang tahun 2022 Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, melaksanakan 10 (Sepuluh) Program 21 (Dua Puluh Satu) Kegiatan dan 39 (Tiga Puluh Sembilan) Sub Kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Adapun uraian program Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdapat 2 sub kegiatan
2. Program Pengelolaan Izin Lokasi dengan Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 1 sub kegiatan
3. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 2 sub kegiatan
4. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan dengan Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 1 sub kegiatan
5. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dengan Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 2 sub kegiatan
6. Program Penetapan Tanah Ulayat dengan Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 1 sub kegiatan
7. Program Pengelolaan Tanah Kosong dengan Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong, terdapat 1 sub kegiatan
8. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah dengan Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah, terdapat 1 sub kegiatan

9. Program Penatagunaan Tanah dengan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 1 sub kegiatan
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, terdapat 2 sub kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dengan pendanaan Rp 15,923,930,880.00. Sampai dengan triwulan II (Dua) tahun 2022 total anggaran yang mampu diserap adalah sebesar Rp 8,165,033,039.00 atau sebesar 51,28% dari keseluruhan total anggaran. Adapun rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja disajikan dalam tabel I .

Berdasarkan hasil evaluasi hasil pelaksanaan sampai dengan triwulan II (Dua), analisis masing-masing capaian sebagai berikut :

TABEL 1.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2022
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
(MAPPING RENSTRA PERANGKAT DAERAH SESUAI KEPMENDAGRI 050-3708

Nama OPD : DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

[illegible]

01. 03. 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Indeks Perencanaan Tata Ruang										
01. 03. 12 2.01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah RTRW Yang ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	1	Perda	1	1	Perda	1	100%		2	100%
01. 03. 12 2.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah RDTR Yang ditetapkan Menjadi Peraturan Bupati	2	Perbup	4	2	Perbup	2	100%		6	100%
01. 03. 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelaksanaan Tata Ruang										
01. 03. 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Materi Teknis	1	Dokumen	-	1	Dokumen	1	100%		1	100%

[illegible]

[illegible]

2 10 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah										
2 10 01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas										
2 10 01. 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	10	Jumlah dokume n	10	10	Jumlah dokumen	10	100%		20	100%
2 10 01. 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	5	Jumlah dokume n	5	5	Jumlah dokumen	5	100%		10	100%
2 10 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang akuntabel										
2 10 01. 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	76	Orang/B ulan	76	76	Orang/Bulan	76	100%		152	100%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2 10 06 2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penetapan Subjek dan objek Rdistribusi Tanh Serta Ganti kerugian Tanah kebelbihan maksimum										
2 10 06 2.01 02	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah laporan hasil Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	1	Dokumen	1	1	Dokumen	1	100%		2	100%
2 10 06 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil koordinasi penyelenggaraan Redistribusi Tanah obyek Reforma Agraria dalam satu darah Kabupaten/kota	1	Dokumen	-	1	Dokumen	1	-		1	0%

[illegible]

2 10 07 2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota										
2 10 07 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat	1	Dokumen	-	1	Dokumen	1	1.00		1	100%
2 10 08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Tanah Aset Pemerintah Daerah yang Bersertifikat										
2 10 08 2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah laporan hasil Penyelesaian masalah Tanah Kosong										
2 10 08 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi penyelesaian tanah kosong	1	Dokumen	-	1	Dokumen	1	100%		1	100%

2 10 08 2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong										
2 10 08 2.02 01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan hasil kegiatan inventariasasi tanah kosong	1	Dokume n	-	1	Dokumen	1	100%		1	100%
2 10 08 2.02 02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Yanah Kosong	1	Dokume n	-	1	Dokumen	1	100%		1	100%
2 10 09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat										
2 10 09 2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah laporan penerbitan Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT										
2 10 09 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pemberian Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT	1	Dokume n	1	1	Dokumen	1	100%		2	100%

2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tersedianya Penetaangunaan Tanah										
2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi										
2 10 10 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan hasil kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	1	Dokume n	1	1	Dokumen	1	100%		2	100%

TABEL 1.2
REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN APBD TAHUN 2022

Nama OPD : DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatn/Sub Kegiatan (APBD 2022)	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Tahun 2022		Realisai Capaian Tahun 2022		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan 2022		
					K	%	Target (RP)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (Rp)
1	2	3	4		5	6=5/4* 100	7	8	9 =(8/7)
	BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG								
01. 03. 12	PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	65	Persen	65	100	1,820,000,000	227,654,263.00	0.13
01. 03. 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Indeks Perencanaan Tata Ruang	10	Persen	10	100	730,000,000	88,468,180.00	0.12
01. 03. 12 2.01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah RTRW Yang ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	1	Perda	1	100	150,000,000	56,156,100	0.37

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatn/Sub Kegiatan (APBD 2022)	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Tahun 2022		Realisai Capaian Tahun 2022		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan 2022		
					K	%	Target (RP)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (Rp)
01. 03. 12 2.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah RDTR Yang ditetapkan Menjadi Peraturan Bupati	2	Perbup	2	100	580,000,000	32,312,080	0.06
01. 03. 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelaksanaan Tata Ruang	16.77	Persen	16.77	100	485,000,000	13,882,500.00	0.03
01. 03. 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Materi Teknis	1	Dokumen	1	100	485,000,000	13,882,500.00	0.03
01. 03. 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pemanfaatan Tata Ruang	4.89	Persen	4.89	100	120,000,000	23,289,500.00	0.19

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatn/Sub Kegiatan (APBD 2022)	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Tahun 2022		Realisasi Capaian Tahun 2022		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan 2022		
					K	%	Target (RP)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (Rp)
01. 03. 12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1) Jumlah pertimbangan teknis pemanfaatan ruang yang diterbitkan, 2) Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang , 3) Jumlah kelurahan/desa yang melakukan konsultasi/supervisi	1) 100 2) 0 3) 0	1) Berkas , 2) Dokum en, 3) Kelurahan/ Desa	1) 100 2) 0 3) 0	100	60,000,000	10,369,500	0.17
01. 03. 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase data dan informasi terkini	20	Persen	20	100	60,000,000	12,920,000	0.22
01. 03. 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pengendalian Tata Ruang	6.87	Persen	6.87	100	485,000,000	102,014,083.00	0.21

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatn/Sub Kegiatan (APBD 2022)	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Tahun 2022		Realisasi Capaian Tahun 2022		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan 2022		
					K	%	Target (RP)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (Rp)
01. 03. 12 2.04 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1) Jumlah Materi Teknis 2) Jumlah peraturan bupati tentang mengenai insentif dan disinsentif	1) 1 2) 0	1) Dokum en, 2) Perbup	1) 1 2) 0	100	200,000,000	70,288,083	0.35
01. 03. 12 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1) Jumlah pelanggaran yang teridentifikasi 2) Jumlah sistem/aplikasi terkait pengendalian pelanggaran pemanfaatan ruang	1) 50 2) 1	1) Berkas, 2) Aplikasi ,	1) 50 2) 1	100	65,000,000	6,600,000	0.10
01. 03. 12 2.04 03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah pelanggaran yang ditertibkan	20	Berkas	20	100	150,000,000	14,526,000	0.10
01. 03. 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah rapat koordinasi	20	Kegiata n	1	5	70,000,000	10,600,000	0.15

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatn/Sub Kegiatan (APBD 2022)	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Tahun 2022		Realisasi Capaian Tahun 2022		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan 2022		
					K	%	Target (RP)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (Rp)
	BIDANG URUSAN GENERIK								
2 10 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74	Nilai	74	100	12,251,906,166	7,526,312,776.00	0.61
2 10 01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	15	Dokumen	15	100	125,000,000	42,088,500.00	0.34
2 10 01. 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	10	Jumlah dokumen	10	100	75,000,000	26,311,500	0.35

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatn/Sub Kegiatan (APBD 2022)	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Tahun 2022		Realisasi Capaian Tahun 2022		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan 2022		
					K	%	Target (RP)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (Rp)
2 10 01. 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	5	Jumlah dokum en	5	100	50,000,000	15,777,000	0.32
2 10 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang akuntabel	15	Laporan	15	100	8,157,365,382	5,674,882,771.00	0.70
2 10 01. 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	76	Jumlah Lapora n	76	100	7,871,245,382.00	5,577,292,771	0.71
2 10 01. 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	2	Jumlah Lapora n	2	100	286,120,000	97,590,000	0.34

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatn/Sub Kegiatan (APBD 2022)	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Tahun 2022		Realisasi Capaian Tahun 2022		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan 2022		
					K	%	Target (RP)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (Rp)
2 10 01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) Pada Perangkat Daerah	1	Dokum en	1	100	74,000,000	37,316,000.00	0.50
2 10 01. 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Jumlah Lapora n	2	200	74,000,000	37,316,000.00	0.50
2 10 01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1	Dokum en	1	100	100,000,000	16,460,000.00	0.16
2 10 01. 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data administrasi kepegawaian	5	Dokum en	5	100	100,000,000	16,460,000.00	0.16

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatn/Sub Kegiatan (APBD 2022)	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Tahun 2022		Realisasi Capaian Tahun 2022		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan 2022		
					K	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (Rp)
2 10 01. 2.06 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	Layanan	7	100	716,275,300	278,739,510.00	0.39
2 10 01. 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen insatalasi listrik	15	Jumlah Komponen	15	100	34,967,700	680,000	0.02
2 10 01. 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	45	Jenis	45	100	104,947,200	98,321,000	0.94
2 10 01. 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	1). 7 2). 1200 3). 1000	1). Jenis 2). Kotak, 3). Porsi	1). 7 2). 1200 3). 1000	100	170,545,400	26,650,000	0.16
2 10 01. 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	1) 4 2) 3600 0	1) jenis 2) Lembar	1) 4 2) 36000	100	60,000,000	47,189,050	0.79

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatn/Sub Kegiatan (APBD 2022)	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Tahun 2022		Realisasi Capaian Tahun 2022		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan 2022		
					K	%	Target (RP)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (Rp)
2 10 01. 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	15	Kali	78	520	245,815,000	105,899,460	0.43
2 10 01. 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen	1	Dokumen	1	100	100,000,000	-	-
2.10.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		15	Unit	15	100	-	-	-
2.10.0 1.2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		15	Unit	15	100	-	-	-
2 10 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	12	100	1,418,305,484	989,038,282.00	0.70

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatn/Sub Kegiatan (APBD 2022)	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Tahun 2022		Realisai Capaian Tahun 2022		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan 2022		
					K	%	Target (RP)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (Rp)
2 10 01. 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5	Rekening	5	100	215,000,000	149,494,282	0.70
2 10 01. 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1) Jumlah bulan penyediaan tenaga pendukung non PNS, 2) Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor	1) 51 2) 8	1) Orang, 2) Orang	1) 51 2) 8	100	1,203,305,484	839,544,000	0.70
2 10 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	13	Unit	13	100	1,660,960,000	588,296,900.00	0.35
2 10 01. 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak kendaran dinas	6	Unit	6	100	67,500,000	7,229,400.00	0.11

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatn/Sub Kegiatan (APBD 2022)	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Tahun 2022		Realisai Capaian Tahun 2022		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan 2022		
					K	%	Target (RP)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (Rp)
2 10 01. 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaran dinas yang dipelihara	6	Unit	6	100	393,460,000	192,595,000	0.49
2 10 01. 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dilakukan Rehab	1	Gedung	1	100	1,200,000,000	389,112,500	0.32
	BIDANG URUSAN PERTANAHAN								
2 10 02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi	15	Persen	15	100	110,000,000	25,840,000.00	0.23

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatn/Sub Kegiatan (APBD 2022)	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Tahun 2022		Realisai Capaian Tahun 2022		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan 2022		
					K	%	Target (RP)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (Rp)
2 10 02 2.01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pemberian izin Lokasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokum en	1	100	110,000,000	25,840,000.00	0.23
2 10 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	1	Dokum en	1	100	110,000,000	25,840,000.00	0.23
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melauai mediasi	80	Persen	80	100	275,000,000	46,297,000.00	0.17
2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penyelesaian sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	22	Dokum en	22	100	275,000,000	46,297,000.00	0.17

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatn/Sub Kegiatan (APBD 2022)	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Tahun 2022		Realisasi Capaian Tahun 2022		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan 2022		
					K	%	Target (RP)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (Rp)
2 10 04 2.01 01	Inventarisasi sengketa,konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah/kota	Tersedianya informasi rencana lahan pembangunan yg tdk bersengketa dan jumlah laporan hasil inventarisasi sengketa,konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah/kota	2	Dokum en	2	100	225,000,000	23,465,000	0.10
2 10 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah laporan hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	20	Dokum en	20	100	50,000,000	22,832,000	0.46
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	70	Persen	70	100	250,000,000	30,290,000.00	0.12

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatn/Sub Kegiatan (APBD 2022)	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Tahun 2022		Realisasi Capaian Tahun 2022		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan 2022		
					K	%	Target (RP)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (Rp)
2 10 05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6	Dokum en	6	100	250,000,000	30,290,000.00	0.12
2 10 05 2.01 01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Daftar Masyarakat yang ditetapkan Penerima ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	1	Dokum en	1	100	250,000,000	30,290,000.00	0.12
2 10 06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan	83	Persen	83	100	300,000,000	56,210,000.00	0.19
2 10 06 2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penetapan Subjek dan objek Rdistribusi Tanh Serta Ganti kerugian Tanah kebelbihan maksimum	2	Dokum en	2	100	200,000,000	24,595,000.00	0.12

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatn/Sub Kegiatan (APBD 2022)	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Tahun 2022		Realisasi Capaian Tahun 2022		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan 2022		
					K	%	Target (RP)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (Rp)
2 10 06 2.01 02	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah laporan hasil Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	1	Dokum en	1	100	100,000,000	24,595,000.00	0.25
2 10 06 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil koordinasi penyelenggaraan Redistribusi Tanah obyek Reforma Agraria dalam satu darah Kabupaten/kota	1	Dokum en	1	100	100,000,000	-	-
2 10 06 2.02	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokum en	1	100	100,000,000	31,615,000.00	0.32

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatn/Sub Kegiatan (APBD 2022)	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Tahun 2022		Realisasi Capaian Tahun 2022		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan 2022		
					K	%	Target (RP)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (Rp)
2 10 06 2.02 01	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokum en	1	100	100,000,000	31,615,000.00	0.32
2 10 07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase tersedianya Penetapan Tanah Ulayat	15	Persen	15	100	75,000,000	27,500,000.00	0.37
2 10 07 2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabuapten/Kota	Jumlah laporan hasil penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota	1	Dokum en	1	100	75,000,000	27,500,000.00	0.37
2 10 07 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat	1	Dokum en	1	100	75,000,000	27,500,000.00	0.37
2 10 08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Tanah Aset Pemerintah Daerah yang Bersertifikat	55	Persen	55	100	592,024,714	154,609,000.00	0.26

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatn/Sub Kegiatan (APBD 2022)	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Tahun 2022		Realisai Capaian Tahun 2022		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan 2022		
					K	%	Target (RP)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (Rp)
2 10 08 2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah laporan hasil Penyelesaian masalah Tanah Kosong	1	Dokum en	1	100	60,000,000	16,765,000.00	0.28
2 10 08 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi penyelesaian tanah kosong	1	Dokum en	1	100	60,000,000	16,765,000.00	0.28
2 10 08 2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	1	Kegiata n	1	100	532,024,714	137,844,000.00	0.26
2 10 08 2.02 01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan hasil kegiatan inventariasasi tanah kosong	0	Dokum en	1	#DIV/0!	60,000,000	17,870,000	0.30
2 10 08 2.02 02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Yanah Kosong	1	Dokum en	1	100	472,024,714	119,974,000	0.25
2 10 09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	82	Persen	82	100	150,000,000	51,190,000.00	0.34

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatn/Sub Kegiatan (APBD 2022)	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Tahun 2022		Realisasi Capaian Tahun 2022		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan 2022		
					K	%	Target (RP)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (Rp)
2 10 09 2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah laporan penerbitan Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT	1	Dokumen	1	100	150,000,000	51,190,000.00	0.34
2 10 09 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pemberian Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT	1	Dokumen	1	100	150,000,000	51,190,000.00	0.34
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tersedianya Penetaangunaan Tanah	76	Persen	76	100	100,000,000	19,130,000.00	0.19
2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1	Dokumen	1	100	100,000,000	19,130,000.00	0.19
2 10 10 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan hasil kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	1	Dokumen	1	100	100,000,000	19,130,000.00	0.19

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target

Dengan melihat tabel di atas maka dapat dikelompokkan beberapa program/kegiatan yang tidak memenuhi target yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Sub Kegiatan 6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan Anggaran sebesar 100.000.000 terserap sebesar 0 dengan persentase 0% tidak terealisasi dikarenakan pada tahap perubahan pagu kegiatan dialihkan ke sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya untuk merehab ruangan Record Center Dinas Pertanahan Dan penataan Ruang.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang Memenuhi Target

1. Program Pengelolaan Izin Lokasi dengan Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota,
3. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan dengan Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dengan Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Penetapan Tanah Ulayat dengan Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Pengelolaan Tanah Kosong dengan Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
7. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah dengan Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah
8. Program Penatagunaan Tanah dengan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaraan yang direncanakan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya, atau Melebihi Target Kinerja Program/ Kegiatan.

faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan

Adapun beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya proses penyerapan anggaran dikarenakan penerbitan SPD(Surat Penyediaan dana) dari BPKAD berdasarkan kondisi dan ketersediaan anggaran di Kas daerah ;
2. Kurangnya koordinasi untuk beberapa kegiatan yang tidak terealisasi sesuai dengan target.
3. Kurangnya Tenaga administrasi yang membantu PPTK dalam urusan administrasi pertanggungjawaban.

Adapun tercapainya target kinerja ditunjang oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Penyusunan target Rencana kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas;
2. Penganggaran Kegiatan sesuai dengan Rencana Kinerja Dinas;
3. Waktu dan pelaksanaan kegiatan yang mencukupi sesuai dengan *time schedule*;
4. Kualitas dan komitmen sumber daya manusia untuk pencapaian target Program/kegiatan;
5. Motivasi, arahan dan bimbingan dari pimpinan serta pengambilan keputusan yang dilakukan Pimpinan sehingga membantu optimalisasi kinerja;
6. Dukungan antar pegawai dan koordinasi yang baik sebagai sebuah tim;
7. Kegiatan pada tahun 2022 sudah mulai banyak dilaksanakan karena kondisi pandemi Covid-19. sudah mulai membaik.

2.1.5 Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah.

1. Meningkatnya status legalitas tanah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang akan berpengaruh terhadap opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
2. Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara yang sangat diperlukan dalam pencapaian target pembangunan;
3. Tertib administrasi pertanahan dengan penerbitan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) menjadi dasar bagi perhitungan PBB dan menjadi sumber PAD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk memperoleh legalitas atas penguasaan tanah nya;
5. Terfasilitasinya beberapa kasus sengketa pertanahan yang perlu penyelesaian sehingga memperkecil jumlah konflik pertanahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

- ## 2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yaitu:

[illegible]

2	Jumlah Rencana Detail yang telah ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah	Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	0	100%	0	0	100%	0	8,58%	
		Keberadaan Perda IMB	0	100%	0	0	100%	0	ada	
		Keberadaan Perda RTRW (kesesuaian pemanfaatan Tata Ruang)	100%	100%	100%	100%	100%	98,50%	ada	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Pengertian isu strategis menurut Permendagri 54 Tahun 2010 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Dengan demikian isu strategis merupakan permasalahan pokok yang bersifat sangat strategis dan signifikan yang dihadapi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas permasalahan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD.

Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, antara lain :

1. Masih rendahnya sertipikasi aset tanah milik pemerintah daerah;
2. Belum dimilikinya dokumen perencanaan Tata Ruang yang baik;
3. Masih terdapat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
4. Belum tertibnya administrasi pertanahan di masing-masing Desa/Kecamatan seperti penertiban SKPT yang menjadi dasar pemungutan pajak atas tanah;
5. Banyaknya persoalan-persolan sengketa pertanahan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum terselesaikan baik yang dikuasai oleh masyarakat, Pemerintah Daerah maupun pihak ketiga.

6. Pemetaan Program dan Kegiatan baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
7. Adaptasi perubahan kebiasaan baru dengan adanya Pandemi COVID-19 yang sedang mewabah di seluruh dunia.

2.3.1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan dinas.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas embantuan di bidang Pertanahan dan Penataan Ruang.

b. Fungsi

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Adapun susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, membawahkan :

- Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
- Sub Bagian Kepegawaian, dan
- Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

3. Bidang Tata Ruang, membawahkan :

- Seksi Perencanaan Tata Ruang
- Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
- Seksi Pemetaan Tata Ruang

4. Bidang Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan, membawahkan :

- Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah
- Seksi Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan

- Seksi Data dan Informasi Pertanahan
 - 5. Bidang Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah, membawahkan :
 - Seksi Penatagunaan Tanah
 - Seksi Data dan Pemetaan Tematik
 - Seksi Penguatan Hak Atas Tanah
 - 6. Bidang Sengketa Tanah, membawahkan :
 - Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan
 - Seksi Advokasi dan Pengendalian Sengketa Pertanahan
 - Seksi Penyuluhan Pertanahan
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas, antara lain :

1. Penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan secara hirarkis dan sistematis.
2. Belum dimilikinya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) per wilayah;
3. Adanya perbedaan kondisi antara data tata ruang dan kondisi lapangan.
4. Perlu peningkatan pengawasan dan pengendalian ruang;
5. Perlunya penertiban kepemilikan tanah oleh Pemerintah Daerah;
6. Perlunya penertiban administrasi penguasaan tanah masyarakat dalam rangka peningkatan PAD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui penerbitan SKPT dan PBB;
7. Perlunya penertiban permasalahan, konflik/sengketa pertanahan di beberapa kecamatan/desa dan ex HGU di beberapa perusahaan baik dengan masyarakat maupun dengan yang menguasai tanah tersebut;
8. Belum terkoordinirnya data-data pertanahan dan penataan ruang dengan baik dan tersistem;

2.3.3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Milenium Developmnet Goals)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang berpegang pada Visi dan Misi Organisasi Perangkat Daerah yang telah dibuat dan disepakati, yaitu Ssebagai berikut :

1. Visi
"Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan"
2. Misi
 - Memantapkan Reformasi Birokrasi untuk Rakyat
 - Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah

Dala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang melaksanakan Misi Ke Lima Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu "Meningkatkan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Menuju Daya Saing Daerah" , yang tujuannya untuk menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah.

2.3.4.Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

1. Penyelesaian Sertifikasi Lahan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Meyeleaikan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah di beberapa Wilayah Di Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Mengatasi ketidakperpaduan rencana tata ruang dengan kondisi lapangan;
4. Mengembangkan sarana dan prasarana SIG (Sistem Informasi Geografi) Pertanahan dan penataan ruang.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD dimaksudkan sebagai perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, yang dilakukan melalui tahapan

Dengan berdasarkan beberapa pertimbangan yang ada, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara, perlu melakukan beberapa perubahan dalam Renja Kerja 2022, dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain :

1. Diperlukannya pengadaan Alat ukur GPS Geodetik GPS ini sangat diperlukan dalam proses pengukuran dan pemetaan, sehingga

sangat diperlukan khususnya bagi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Kerja yang dimiliki oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.
3. Adanya penyerapan anggaran dan realisasi hasil/keluaran yang rendah untuk beberapa kegiatan.

Sebagai bentuk tindak lanjut atas beberapa kondisi tersebut di atas, maka perlu dilakukan review rancangan perubahan RKPD agar hasil/keluaran dan target di tahun 2022 tetap bisa terlaksana, di antara sebagai berikut :

- a. Melakukan pergeseran anggaran untuk beberapa kegiatan ke kegiatan yang lain yang memerlukan penganggaran dalam rangka pencapaian output;
- b. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan dari capaian target output beberapa kegiatan.

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2022 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang disajikan dalam tabel terlampir.

TABEL C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

OPD : DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

Rancangan Awal RKPD/Renstra PD					Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program/Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu	Catatan Penting
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
	BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG					BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG						
I	PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	65	Perse n	1,820,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG		Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	65	Persen	2,520,000,000	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Indeks Perencanaan Tata Ruang	10	Perse n	730,000,000	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Indeks Perencanaan Tata Ruang	10	Persen	1,230,000,000	

	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah RTRW Yang ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	1	Perda	150,000,000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1	Dokumen	450,000,000	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah RDTR Yang ditetapkan Menjadi Peraturan Bupati	2	Perbup	580,000,000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2	Dokumen	780,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelaksanaan Tata Ruang	16.77	Perse	485,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Pelaksanaan Tata Ruang	16.77	Persen	585,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Materi Teknis	1	Dokumen	485,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Muara Muntai, Sebulu, Marang Kayu, Anggana, Loa Kulu	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1	Dokumen	585,000,000	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pemanfaatan Tata Ruang	4.89	Persen	120,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Pemanfaatan Tata Ruang	4.89	Persen	220,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1) Jumlah pertimbangan teknis pemanfaatan ruang yang diterbitkan, 2) Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang , 3) Jumlah kelurahan/desa yang melakukan konsultasi/supervisi	1) 100 2) 0 3) 0	1) Berkas , 2) Dokumen, 3) Kelurahan / Desa	60,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1	Dokumen	160,000,000	
	Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase data dan informasi terkini	20	Persen	60,000,000	Sistem Informasi Penataan Ruang	Muara Badak, Samboja, Muara Jawa	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1	Dokumen	60,000,000	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pengendalian Tata Ruang	6.87	Persen	485,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Pengendalian Tata Ruang	6.87	Persen	485,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1) Jumlah Materi Teknis 2) Jumlah peraturan bupati tentang mengenai insentif dan disinsentif	1) 1 2) 0	1) Dokumen, 2) Perbup	200,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Muara Muntai, Loa Janan, Muara Badak, Kota Bangun, Muara Kaman, Muara Jawa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1	Dokumen	200,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1) Jumlah pelanggaran yang teridentifikasi 2) Jumlah sistem/aplikasi terkait pengendalian pelanggaran pemanfaatan ruang	1) 50 2) 1	1) Berkas, 2) Aplikasi,	65,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Loa Janan, Mauara Badak, Kota Bangun, Samboja, Muara Jawa, Tenggarong Seberang, Muara Wis	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1	Dokumen	65,000,000	

	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah pelanggaran yang ditertibkan	20	Berkas	150,000,000	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Loa Kulu, Loa Janan, Muara Badak	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	20	Kasus	135,616,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah rapat koordinasi	20	Kegiatan	70,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	Dokumen	84,384,000	
	BIDANG URUSAN GENERIK					BIDANG URUSAN GENERIK						
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74	Nilai	12,251,906,166	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74	Nilai	12,594,409,917	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	15	Dokumen	125,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	15	Dokumen	125,000,000	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	10	Jumlah dokumen	75,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	75,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	5	Jumlah dokumen	50,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	50,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang akuntabel	15	Laporan	8,157,365,382	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang akuntabel	15	Laporan	8,195,884,919	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	76	Orang/Bulan	7,871,245,382.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76	Orang/Bulan	7,909,764,919.00	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	2	Jumlah Laporan	286,120,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	2	Jumlah Laporan	286,120,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) Pada Perangkat Daerah	1	Dokumen	74,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) Pada Perangkat Daerah	1	Dokumen	78,099,999	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Jumlah Laporan	74,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	78,099,999	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	100,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	100,000,000	

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data administrasi kepegawaian	5	Dokumen	100,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data administrasi kepegawaian	5	Dokumen	100,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	Layanan	716,275,300	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	Layanan	707,983,445	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen insatalasi listrik	15	Jumlah Komponen	34,967,700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	34,967,700	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	45	Jenis	104,947,200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	104,947,200	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	1). 7 2). 1200 3). 1000	1). Jenis 2). Kotak, 3). Porsi	170,545,400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	163,175,400	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	1) 4 2) 36000	1) jenis 2) Lembar	60,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaanyang Disediakan	1	Paket	60,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	15	Kali	245,815,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78	Laporan	344,893,145	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen	1	Dokumen	100,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	-	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		15	Unit	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit	15	Unit	313,233,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit	15	Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit	15	Unit	313,233,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	1,418,305,484	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	1,409,121,084	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5	Rekening	215,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Laporan	207,025,600	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1) Jumlah bulan penyediaan tenaga pendukung non PNS, 2) Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor	1) 51 2) 8	1) Orang , 2) Orang	1,203,305,484	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Laporan	1,202,095,484	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	13	Unit	1,660,960,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	13	Unit	1,665,087,470	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak kendaran dinas	6	Unit	67,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit	67,500,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaran dinas yang dipelihara	6	Unit	393,460,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	350,104,000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dilakukan Rehab	1	Gedung	1,200,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	1,247,483,470	
	BIDANG URUSAN PERTANAHAN					BIDANG URUSAN PERTANAHAN						
III	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi	15	Persen	110,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI		Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi	15	Persen	110,000,000	
	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pemberian izin Lokasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	110,000,000	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pemberian izin Lokasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	110,000,000	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	1	Dokumen	110,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Loa Kulu, Loa Janan, Muara Badak, Kota Bangun, Kembang Janggut, Samboja, Muara Jawa, Tenggarong Seberang	Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha	1	Dokumen	110,000,000	
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	80	Persen	275,000,000	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	80	Persen	164,500,000	
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penyelesaian sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	22	Dokumen	275,000,000	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan hasil penyelesaian sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	22	Dokumen	164,500,000	
	Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah/kota	Tersedianya informasi rencana lahan pembangunan yg tdk bersengketa dan jumlah laporan hasil inventarisasi	2	Dokumen	225,000,000	Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah/kota	Muara Badak, Sebulu Samboja	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Dokumen	114,500,000	

		sengketa,konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah/kota										
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah laporan hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	20	Doku men	50,000,000	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Anggana, Muara Bdak, Sebulu, Kenohan, Kembang Janggut, Samboja, Marang Kayu.	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20	Berita Acara	50,000,000	
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	70	Perse n	250,000,000	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	70	Persen	250,000,000	

	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6	Dokumen	250,000,000	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6	Dokumen	250,000,000	
	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Daftar Masyarakat yang ditetapkan Penerima ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	1	Dokumen	250,000,000	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Muara Badak, Tenggarong, Kembang Janggut, Tenggarong Seberang.	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1	Dokumen	250,000,000	
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan	83	Persen	300,000,000	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan	83	Persen	280,000,000	

	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penetapan Subjek dan objek Rdistribusi Tanh Serta Ganti kerugian Tanah kebelbihan maksimum	2	Doku men	200,000,000	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan hasil penetapan Subjek dan objek Rdistribusi Tanh Serta Ganti kerugian Tanah kebelbihan maksimum	2	Dokume n	200,000,000	
	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah laporan hasil Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	1	Doku men	100,000,000	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Kembang Janggut Desa Long Beleh Haloq dan Long Beleh Modang, Tabang Desa Gunung Sari dan Long Lalang, Marang Kayu Desa Santan Ulu, Santan Tengah dan Semangkok.	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Dokume n	100,000,000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil koordinasi penyelenggaraan Redistribusi Tanah obyek Reforma Agraria dalam satu darah Kabupaten/kota	1	Doku men	100,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Anggana, Tabang, Sanga Sanga, Marang Kayu.	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1	Dokume n	100,000,000	

	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100,000,000	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	80,000,000	
	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100,000,000	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Muara Muntai Desa Perian, Muara Muntai Desa Muara Leka, Muara Wis Desa Lebak Mantan	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	80,000,000	
	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase tersedianya Penetapan Tanah Ulayat	15	Persen	75,000,000	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT		Persentase tersedianya Penetapan Tanah Ulayat	15	Persen	75,000,000	

	Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabuapten/Kota	Jumlah laporan hasil penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota	1	Doku men	75,000,000	Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabuapten/Kota		Jumlah laporan hasil penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota	1	Dokume n	75,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat	1	Doku men	75,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Anggana, Sebulu, Muara Kaman, Sanga Sanga.	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Laporan	75,000,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Tanah Aset Pemerintah Daerah yang Bersertifikat	55	Perse n	592,024,714	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		Persentase Tanah Aset Pemerintah Daerah yang Bersertifikat	55	Persen	468,000,500	

	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah laporan hasil Penyelesaian masalah Tanah Kosong	1	Doku men	60,000,000	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		Jumlah laporan hasil Penyelesaian masalah Tanah Kosong	1	Dokume n	52,670,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi penyelesaian tanah kosong	1	Doku men	60,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bangun, Kembang Janggut	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1	Laporan	52,670,000	
	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	1	Kegiat an	532,024,714	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong		Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	1	Kegiatan	415,330,500	
	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan hasil kegiatan inventariasasi tanah kosong	0	Doku men	60,000,000	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Kota Bangun, Kembang Janggut.	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1	Laporan	60,000,000	

	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1	Dokumen	472,024,714	Pemanfaatan Tanah Kosong	Muara Muntai, Loa Kulu, Loa Janan, Anggana, Tenggarong, Kenohan, Muara Kaman, Tabang, Samboja, Muara Jawa	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1	Dokumen	355,330,500	
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	82	Persen	150,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH		Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	82	Persen	150,000,000	
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah laporan penerbitan Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT	1	Dokumen	150,000,000	Penerbitan Izin Membuka Tanah		Jumlah laporan penerbitan Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT	1	Dokumen	150,000,000	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pemberian Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT	1	Dokumen	150,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Muara Kaman, Tabang, Samboja , Muara Jawa, Sanga-sanga, Tenggarong Seberang, Marang Kayu, Muara Wis.	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1	Dokumen	150,000,000	
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tersedianya Penetaangunaan Tanah	76	Persen	100,000,000	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Persentase tersedianya Penetaangunaan Tanah	76	Persen	50,540,000	

	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	3	Dokumen	100,000,000	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan hasil Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	3	Dokumen	50,540,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan hasil kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	1	Dokumen	100,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Loa Kulu, Tenggarong	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	laporan	50,540,000	

2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Usulan-usulan tersebut disajikan dalam tabel 2.5 usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2022, terlampir

TABEL 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

OPD : DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Menurut Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 , Sesuai dengan visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu dengan:

Penjabaran dari visi tersebut sebagai berikut :

- Masyarakat yang sejahtera, Batasan pengertian sejahtera, kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan. Diharapkan dari kemudahan mendapatkan kebutuhan dasar masyarakat dan perekonomian, masyarakat semakin sejahtera.
- Masyarakat yang berbahagia, Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketenteraman Diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian, dan gotong-royong berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan dari menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat membuat warga Kabupaten Kutai Kartanegara semakin berbahagia.

Selain visi dan Misi, pasangan Edi Damansyah dan Rendi Solihin Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan filosofi pembangunan Kukar tahun 2021-2024 yaitu Kukar Idaman. Idaman secara etimologi berarti sesuatu yang diharapkan, yang didambakan, yang dicita-citakan. Sedangkan untuk akronim berarti inovatif, daya saing dan mandiri (Idaman). Kukar Idaman ialah satu gerakan yang mengoptimalkan seluruh potensi daerah, dengan mendorong kreatifitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dan menciptakan daya saing kemandirian yang didasari semangat kolaborasi dan sinergisitas antara pemerintah kabupaten, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mewujudkan Kukar lebih baik ke depan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang ditetapkan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan;

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sesuai tugasnya membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Isu dasar yang dipertimbangkan dalam rangkaian pencapaian visi misi daerah melalui Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tahun 2021 yaitu:

- a. Pencapaian SDG's
- b. Pengentasan kemiskinan
- c. Pencapaian NSPK dan NSPM

Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian beberapa misi pembangunan, di antaranya :

1. Pencapaian Misi I : Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani Dalam pelaksanaan misi ini, Tujuan dan Sasaran yang dituju adalah :

Tujuan : Terwujudnya tertib administrasi pertanahan

Sasaran : Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan

2. Pencapaian Misi IV : Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah Dalam pencapaian misi ini Tujuan dan Sasaran yang dituju adalah sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang produktif dan berkelanjutan

Sasaran : Pembangunan dan Pemanfaatan sesuai Arahana Pola Ruang

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 yang dituangkan dalam Bab III ini, adalah formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada Bab-Bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk matrik rencana program dan kegiatan.

Uraian rencana program dan kegiatan yang disajikan dalam bab III ini bersifat menyeluruh, yang didanai oleh APBD Perubahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Dari hasil evaluasi kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Dalam perubahan rencana kerja tahun 2022 ada beberapa program/kegiatan yang perlu penyesuaian yaitu dengan program yang dijalankan sebanyak 10 (Sepuluh) program yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, sebanyak 3 (Tiga) Kegiatan penyesuaian dilakukan dalam hal penambahan pagu anggaran;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Sebanyak 6 (Enam) kegiatan penyesuaian dilakukan dalam hal penambahan output pekerjaan dan penambahan sub kegiatan baru ;
3. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, 1 (satu) kegiatan;

4. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee, Sebanyak 1 (satu) kegiatan;
5. Program Penatagunaan Tanah, Sebanyak 1 (satu) kegiatan;
6. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, Sebanyak 1 (satu) kegiatan. penyesuaian dilakukan dalam hal penambahan output pekerjaan dan anggaran.
7. Program Pengelolaan Tanah Kosong ,2 dua) kegiatan
8. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah, 1 (Satu) kegiatan penyesuaian dilakukan dalam hal penambahan output pekerjaan dan anggaran.

Sub kegiatan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengalami perubahan sebanyak 22 Sub kegiatan yang meliputi pergeseran anggaran antar rekening, pengurangan output, penambahan output, dan perubahan lainnya yang berimplikasi pada penambahan maupun pengurangan anggarannya.

Berikut disajikan Rencana Perubahan Sub Kegiatan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022, dengan pagu indikatif Sebelum Perubahan sebesar Rp. 15,923,930,880.00 dan pagu Setelah Perubahan sebesar Rp. 16.662.450.417,00 yang tertera pada Tabel Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah terlampir.

Rincian program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Penatann Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel 3 dibawah ini :

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

Nama OPD : DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatn/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan APBD Kepmendagri 050-3708 Tahun 2022				Sesudah Perubahan APBD Kepmendagri 050-3708 Tahun 2022				Bertamb ah/ berkura ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Indikator Kinerja	Terget Capaian Kinerja		Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Terget Capaian Kinerja			Lokasi	Pagu Indikatif	Terge t Capai an Kinerj a	Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11	12	13
	BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG													
01. 03. 12	PROGRAM PENYELENGGARA N PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	65	Persen		1.820.000. 000	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	65	Persen		2.520.000 .000	700.000. 000		2.300.000. 000
01. 03. 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruag Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruag (RRTR) Kabupaten/Kota	Indeks Perencanaa n Tata Ruag	10	Persen		730.000.00 0	Indeks Perencanaa n Tata Ruag	10	Persen		1.230.000 .000	500.000. 000		500.000.00 0

01. 03. 12 2.01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah RTRW Yang ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	1	Perda	Kab. Kutai Kartanegara	150.000.00 0	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota	1	Dokum en	Kab. Kutai Kartanegara	450.000.0 00	300.000. 000	-	-
01. 03. 12 2.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah RDTR Yang ditetapkan Menjadi Peraturan Bupati	2	Perbup	Kab. Kutai Kartanegara	580.000.00 0	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	2	Dokum en	Kab. Kutai Kartanegara	780.000.0 00	200.000. 000	1 Doku men	300.000.00 0
01. 03. 12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah kecamatan yang sudah mendapatk an sosialisasi	-	Kecam atan		-	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan ruang	-	Dokum en		-		4 Doku men	200.000.00 0

01. 03. 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelaksanaa n Tata Ruang	16, 77	Persen		485.000.00 0	Indeks Pelaksanaan Tata Ruang	16, 77	Persen		585.000.0 00	100.000. 000	21,81	600.000.00 0
01. 03. 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Materi Teknis	1	Dokum en	Muara Muntai, Sebulu, Marang Kayu, Anggana, Loa Kulu	485.000.00 0	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota	1	Dokum en	Muara Muntai, Sebulu, Marang Kayu, Anggana, Loa Kulu	585.000.0 00	100.000. 000	1 Doku men	400.000.00 0
01. 03. 12 2.02 03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Komunitas/ Kelompok	-	Komuni tas/ Kelomp ok		-	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	-	Dokum en		-		1 Doku men	200.000.00 0

01. 03. 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pemanfaatan Tata Ruang	4,89	Persen		120.000.000	Indeks Pemanfaatan Tata Ruang	4,89	Persen		220.000.000	100.000.000	5.03 Persen	450.000.000
01. 03. 12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1) Jumlah pertimbangan teknis pemanfaatan ruang yang diterbitkan, 2) Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang, 3) Jumlah kelurahan/desa yang melakukan konsultasi/supervisi	1) 100, 2) 00, 3) 00	1) Berkas, 2) Dokumen, 3) Kelurahan/Desa	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	60.000.000	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1	Dokumen	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	160.000.000	100.000.000	20 Dokumen	300.000.000
01. 03. 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase data dan informasi terkini	20	Persen	Muara Badak, Samboja, Muara Jawa	60.000.000	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1	Dokumen	Muara Badak, Samboja, Muara Jawa	60.000.000	-	1 Dokumen	150.000.000

01. 03. 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pengendalian Tata Ruang	6,87	Persen		485.000.000	Indeks Pengendalian Tata Ruang	6,87	Persen		485.000.000	-	6.87 Persen	750.000.000
01. 03. 12 2.04 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1) Jumlah Materi Teknis 2) Jumlah peraturan bupati tentang mengenai insentif dan disinsentif	1) 1 2) 0	1) Dokumen, 2) Perbup	Muara Muntai, Loa Janan, Muara Badak, Kota Bangun, Muara Kaman, Muara Jawa	200.000.000	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1	Dokumen	Muara Muntai, Loa Janan, Muara Badak, Kota Bangun, Muara Kaman, Muara Jawa	200.000.000	-	1 Dokumen	200.000.000
01. 03. 12 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1) Jumlah pelanggaran yang teridentifikasi 2) Jumlah sistem/aplikasi terkait pengendalian pelanggaran pemanfaatan ruang	1) 50 2) 1	1) Berkas, 2) Aplikasi	Loa Janan, Mauara Badak, Kota Bangun, Samboja, Muara Jawa, Tenggarong Seberang, Muara Wis	65.000.000	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan	1	Dokumen	Loa Janan, Mauara Badak, Kota Bangun, Samboja, Muara Jawa, Tenggarong Seberang, Muara Wis	65.000.000	-	1 Dokumen	200.000.000

							Ruang							
01. 03. 12 2.04 03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah pelanggara n yang diterbitkan	20	Berkas	Loa Kulu, Loa Janan, Muara Badak	150.000.00 0	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	20	Kasus	Loa Kulu, Loa Janan, Muara Badak	135.616.0 00	- 14.384.0 00	20	150.000.00 0
01. 03. 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah rapat koordinasi	20	Kegiata n	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	70.000.000	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	Dokum en	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	84.384.00 0	14.384.0 00	1 Doku men	200.000.00 0
	BIDANG URUSAN GENERIK													
2 10 01.	PROGRAM PENUNJANG	Nilai SAKIP Perangkat	74	Nilai		12.251.906	Nilai SAKIP Perangkat	74	Nilai		12.555.89	303.984.	75 Nilai	11.138.685

	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Daerah				.166	Daerah				0.380	214		.122
2 10 01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	15	Dokumen		125.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	15	Dokumen		125.000.000	-	15 Dokumen	125.000.000
2 10 01. 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	10	Jumlah dokumen	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	75.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	75.000.000	-	10 Dokumen	75.000.000
2 10 01. 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	5	Jumlah dokumen	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	50.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	50.000.000	-	5 Laporan	50.000.000
2 10 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang akuntabel	15	Laporan		8.157.365.382	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang	15	Laporan		8.157.365.382	-	12 Laporan	8.472.879.638,00

							akuntabel							
2 10 01. 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	76	Jumlah Laporan	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	7.871.245.382,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76	Orang/Bulan	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	7.871.245.382,00	-	74 Orang / Bulan	8.222.879.638,00
2 10 01. 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	2	Jumlah Laporan	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	286.120.000	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	2	Jumlah Laporan	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	286.120.000	-	2 Laporan	250.000.000

2 10 01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) Pada Perangkat Daerah	1	Dokumen		74.000.000	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) Pada Perangkat Daerah	1	Dokumen		78.099.999	4.099.999	2 Dokumen	50.000.000
2 10 01. 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Jumlah Laporan	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	74.000.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	78.099.999	4.099.999	2 Laporan	50.000.000
2 10 01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen		100.000.000	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen		100.000.000	-		-
2 10 01. 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data administrasi kepegawaian	5	Dokumen	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	100.000.000	Jumlah Data administrasi kepegawaian	5	Dokumen	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	100.000.000	-		-

2 10 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	Layanan		716.275.300	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	Layanan		717.509.045	1.233.745	7 Layanan	755.000.000
2 10 01. 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik	15	Jumlah Komponen	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	34.967.700	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	34.967.700	-	1 Paket	35.000.000
2 10 01. 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	45	Jenis	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	104.947.200	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	104.947.200	-	1 Paket	105.000.000
2 10 01. 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	1). 7 2). 12 3). 00 10 00	1). Jenis 2). Kotak, 3). Porsi	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	170.545.400	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	163.175.400	- 7.370.000	1 Paket	210.000.000
2 10 01. 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	1) 4 2) 36 00 0	1) jenis 2) Lembar	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	60.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	1	Paket	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	60.000.000	-	1 Dokumen	60.000.000

							Disediakan							
2 10 01. 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	-	Eksemplar		-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Dokumen		-	-	1 Dokumen	15.000.000
2 10 01. 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	15	Kali	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	245.815.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78	Laporan	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	354.418.745	108.603.745	15 Laporan	230.000.000
2 10 01. 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen	1	Dokumen	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	100.000.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	-	- 100.000.000	1 Dokumen	100.000.000
2.10.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		15	Unit		-	Jumlah Unit	15	Unit		313.233.000	313.233.000		-

2.10.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit	15	Unit	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	-	Jumlah Unit	15	Unit	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	313.233.000	313.233.000		-
2 10 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan		1.418.305.484	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan		1.399.595.484	- 18.710.000	12 Bulan	1.418.305.484
2 10 01.2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5	Rekening	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	215.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Laporan	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	197.500.000	- 17.500.000	5 laporan	215.000.000
2 10 01.2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1) Jumlah bulan penyediaan tenaga pendukung non PNS, 2) Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor	1) 51 2) 8	1) Orang, 2) Orang	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	1.203.305.484	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Laporan	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	1.202.095.484	- 1.210.000	2 Laporan	1.203.305.484

2 10 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	13	Unit		1.660.960. 000	Jumlah Barang Milik Daerah	13	Unit		1.665.087 .470	4.127.47 0	14 Unit	317.500.00 0
2 10 01. 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak kendaran dinas	6	Unit	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	67.500.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	67.500.00 0	-	11 Unit	67.500.000
2 10 01. 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaran dinas yang dipelihara	6	Unit	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	393.460.00 0	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	350.104.0 00	- 43.356.0 00	3 Unit	250.000.00 0

2 10 01. 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dilakukan Rehab	1	Gedung	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	1.200.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	1.247.483.470	47.483.470		-
	BIDANG URUSAN PERTANAHAN													
2 10 02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi	15	Persen		110.000.000	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi	15	Persen		110.000.000	-	30 Persen	100.000.000
2 10 02 2.01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pemberian izin Lokasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1	Dokumen		110.000.000	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pemberian izin Lokasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1	Dokumen		110.000.000	-	1 Dokumen	100.000.000

2 10 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	1	Dokumen	Loa Kulu, Loa Janan, Muara Badak, Kota Bangun, Kembang Janggut, Samboja, Muara Jawa, Tenggaraong Seberang	110.000.000	Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha	1	Dokumen	Loa Kulu, Loa Janan, Muara Badak, Kota Bangun, Kembang Janggut, Samboja, Muara Jawa, Tenggaraong Seberang	110.000.000	-	1 Dokumen	100.000.000
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	80	Persen		275.000.000	Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	80	Persen		164.500.000	- 110.500.000	85 Persen	300.000.000
2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penyelesaian sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	22	Dokumen		275.000.000	Jumlah laporan hasil penyelesaian sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	22	Dokumen		164.500.000	- 110.500.000	23 Dokumen	300.000.000

							Kota							
2 10 04 2.01 01	Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah/kota	Tersedianya informasi rencana lahan pembangunan yg tdk bersengketa dan jumlah laporan hasil inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah/kota	2	Dokumen	Muara Badak, Sebulu Samboja	225.000.000	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2	Dokumen	Muara Badak, Sebulu Samboja	114.500.000	- 110.500.000	2 Dokumen	200.000.000
2 10 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah laporan hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.	20	Dokumen	Anggana, Muara Bdak, Sebulu, Kenohan, Kembang Janggut, Samboja, Marang Kayu.	50.000.000	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu)	20	Berita Acara	Anggana, Muara Bdak, Sebulu, Kenohan, Kembang Janggut, Samboja, Marang Kayu.	50.000.000	-	21 Berita Acara	100.000.000

							Daerah Kabupaten/ Kota							
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangun an fasilitas umum	70	Persen		250.000.00 0	Persentase penetapan tanah untuk pembangun an fasilitas umum	70	Persen		250.000.0 00	-	75 Perse n	350.000.0 00
2 10 05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangun an oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	6	Dokum en		250.000.00 0	Jumlah Laporan Hasil Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangun an oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	6	Dokum en		250.000.0 00	-	5 Doku men	350.000.0 00

2 10 05 2.01 01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Daftar Masyarakat yang ditetapkan Penerima ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	1	Dokumen	Muara Badak, Tenggarong, Kembang Janggut, Tenggarong Seberang.	250.000.000	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1	Dokumen	Muara Badak, Tenggarong, Kembang Janggut, Tenggarong Seberang.	250.000.000	-	-	-
2 10 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	Dokumen			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-		Dokumen	-		5 Dokumen	350.000.000

2 10 06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan	83	Persen		300.000.000	Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan	83	Persen		280.000.000	- 20.000.000	86 Persen	600.000.000
2 10 06 2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penetapan Subjek dan objek Rdistribusi Tanh Serta Ganti kerugian Tanah kebelbihan maksimum	2	Dokumen		200.000.000	Jumlah laporan hasil penetapan Subjek dan objek Rdistribusi Tanh Serta Ganti kerugian Tanah kebelbihan maksimum	2	Dokumen		200.000.000	-	4 Dokumen	400.000.000

2 10 06 2.01 01	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah laporan hasil Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	-	Dokumen		-	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	Dokumen		-		1 Dokumen	100.000.000
2 10 06 2.01 02	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah laporan hasil Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	1	Dokumen	Kembang Janggut Desa Long Beleh Haloq dan Long Beleh Modang, Tabang Desa Gunung Sari dan Long Lalang, Marang Kayu Desa Santan Ulu, Santan Tengah dan Semangkok.	100.000.000	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Dokumen	Kembang Janggut Desa Long Beleh Haloq dan Long Beleh Modang, Tabang Desa Gunung Sari dan Long Lalang, Marang Kayu Desa Santan Ulu, Santan Tengah dan Semangkok.	100.000.000	-	1 Dokumen	100.000.000

2 10 06 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil koordinasi penyelenggaraan Redistribusi Tanah obyek Reforma Agraria dalam satu darah Kabupaten/kota	1	Dokumen	Anggana, Tabang, Sanga Sanga, Marang Kayu.	100.000.000	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1	Dokumen	Anggana, Tabang, Sanga Sanga, Marang Kayu.	100.000.000	-	1 Dokumen	100.000.000
3 10 06 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	Dokumen			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	Dokumen		-		1 Dokumen	100.000.000

2 10 06 2.02	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1	Dokum en		100.000.00 0	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1	Dokum en		80.000.00 0	- 20.000.0 00	2 Doku men	200.000.0 00,00
2 10 06 2.02 01	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Inventarisas i Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/	1	Dokum en	Muara Muntai Desa Perian, Muara Muntai Desa Muara Leka, Muara Wis Desa Lebak Mantan	100.000.00 0	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/	1	Dokum en	Muara Muntai Desa Perian, Muara Muntai Desa Muara Leka, Muara Wis Desa Lebak Mantan	80.000.00 0	- 20.000.0 00	1 Doku men	100.000.0 00,00

		Kota					Kota							
3 10 06 2.02 02	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	Dokumen			Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	Dokumen		-		1 Dokumen	100.000.000,00
2 10 07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase tersedianya Penetapan Tanah Ulayat	15	Persen		75.000.000	Persentase tersedianya Penetapan Tanah Ulayat	15	Persen		75.000.000	-	30 Persen	200.000.000

2 10 07 2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabuapten/Kota	Jumlah laporan hasil penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/ kota	1	Dokumen		75.000.000	Jumlah laporan hasil penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota	1	Dokumen		75.000.000	-	2 Dokumen	200.000.000
2 10 07 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat	1	Dokumen	Anggana, Sebulu, Muara Kaman, Sanga Sanga.	75.000.000	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1	Laporan	Anggana, Sebulu, Muara Kaman, Sanga Sanga.	75.000.000	-	1 Laporan	100.000.000

3 10 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						1 Dokumen	100.000.000
2 10 08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Tanah Aset Pemerintah Daerah yang Bersertifikat	55	Persen		592.024.714	Persentase Tanah Aset Pemerintah Daerah yang Bersertifikat	55	Persen		468.000.500	- 124.024.214	60 Persen	934.799.664
2 10 08 2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah laporan hasil Penyelesaian masalah Tanah Kosong	1	Dokumen		60.000.000	Jumlah laporan hasil Penyelesaian masalah Tanah Kosong	1	Dokumen		52.670.000	- 7.330.000	1 Dokumen	100.000.000
2 10 08 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi penyelesaian tanah kosong	1	Dokumen	Kota Bangun, Kembang Janggut	60.000.000	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1	Laporan	Kota Bangun, Kembang Janggut	52.670.000	- 7.330.000	1 Laporan	100.000.000

2 10 08 2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	1	Kegiatan		532.024.714	Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	1	Kegiatan		415.330.500	- 116.694.214	2 Dokumen	834.799.664
2 10 08 2.02 01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan hasil kegiatan inventarisasi tanah kosong	0	Dokumen	Kota Bangun, Kembang Janggut.	60.000.000	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota yang Diinventarisasi.	1	Laporan	Kota Bangun, Kembang Janggut.	60.000.000	-	1 Laporan	100.000.000

2 10 08 2.02 02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaata n Yanah Kosong	1	Dokum en	Muara Muntai, Loa Kulu, Loa Janan, Anggana,Te nggarong, Kenohan, Muara Kaman, Tabang, Samboja, Muara Jawa	472.024.71 4	Jumlah Dokumen Pemanfaata n Tanah Kosong	1	Dokum en	Muara Muntai, Loa Kulu, Loa Janan, Anggana,Te nggarong, Kenohan, Muara Kaman, Tabang, Samboja, Muara Jawa	355.330.5 00	- 116.694. 214	1 Doku men	734.799.66 4
2 10 09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	82	Persen		150.000.00 0	Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	82	Persen		150.000.0 00	-	83 Perse n	200.000.00 0
2 10 09 2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah laporan penerbitan Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT	1	Dokum en		150.000.00 0	Jumlah laporan penerbitan Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT	1	Dokum en		150.000.0 00	-	2 Doku men	200.000.00 0

2 10 09 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pemberian Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT	1	Dokumen	Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Muara Kaman, Tabang, Samboja , Muara Jawa, Sanga-sanga, Tenggarong Seberang, Marang Kayu, Muara Wis.	150.000.000	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1	Dokumen	Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Muara Kaman, Tabang, Samboja , Muara Jawa, Sanga-sanga, Tenggarong Seberang, Marang Kayu, Muara Wis.	150.000.000	-	1 Dokumen	100.000.000
3 10 09 2.01 02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	-	Dokumen		-	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	-	Dokumen		-		1 Dokumen	100.000.000

2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tersedianya Penetaangu naan Tanah	76	Persen		100.000.00 0	Persentase tersedianya Penetaangu naan Tanah	76	Persen		50.540.00 0	- 49.460.0 00	77 Perse n	300.000.00 0
2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Perencanaa n Penggunaa n Tanah yang Hamparann ya Lintas Daerah kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	3	Dokum en		100.000.00 0	Jumlah laporan hasil Perencanaa n Penggunaan Tanah yang Hamparann ya Lintas Daerah kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	3	Dokum en		50.540.00 0	- 49.460.0 00	1 Doku men	300.000.00 0

2 10 10 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan hasil kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	1	Dokumen	Loa Kulu, Tenggara	100.000.000	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	1	laporan	Loa Kulu, Tenggara	50.540.000	- 49.460.000	1 Laporan	100.000.000
3 10 10 2.01 02	Koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil kegiatan Koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten/kota	-	Dokumen		-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	-	Dokumen		-		1 Dokumen	100.000.000

4 10 10 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota	-	Dokumen		-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Dokumen		-		1 Dokumen	100.000.000
JUMLAH						15.923.930.880					16.623.930.880	700.000.000		16.423.484.786

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja PD) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 di lingkup Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2022 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2022 mengacu kepada Renstra Perubahan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar yang diemban oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebagai salah satu OPD di lingkup Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja PD) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2022 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022. Akhirnya ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Dokumen ini.

Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 05 Agustus 2022

Kepala Dinas
Pertanahan dan Penataan Ruang



SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671027 199403 1 008